

Perang Makassar 1666–1669: Dinamika Politik dan Perlawanan Kerajaan Gowa terhadap VOC

Aidul Akbar¹, Bahri², M.Rasyid Ridha³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

E-mail: 250002301058@student.unm.ac.id¹, bahri@unm.ac.id², m.rasyid.ridha@unm.ac.id³

Article History:

Received: 12 Maret 2026

Revised: 01 Mei 2026

Accepted: 17 Mei 2026

Keywords: Perang Makassar, Kerajaan Gowa, VOC, Dinamika Politik.

Abstract: Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Nusantara pada abad ke-17. Peristiwa ini menunjukkan persaingan antara kekuatan laut lokal dengan kebijakan ekspansi kolonial oleh VOC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang menjadi penyebab konflik antara Kerajaan Gowa dan VOC serta menelaah berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan Gowa untuk mempertahankan kekuasaan politik dan kemandirian ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, serta mempergunakan sumber sekunder dan literatur historiografi yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa perang tersebut dimulai dari perbedaan dalam sistem perdagangan bebas yang diterapkan oleh Gowa dan kebijakan monopoli yang digunakan VOC. Konflik menjadi lebih rumit karena ada peran aktor lokal seperti Arung Palakka yang bekerja sama dengan VOC, sehingga perang bukan hanya pertarungan antara pihak kolonial dan lokal, tapi juga terkait dengan dinamika politik yang terjadi di dalam Sulawesi Selatan. Perjanjian Bongaya tahun 1667 menjadi peristiwa penting yang melemahkan kekuatan laut Gowa dan memperkuat pengaruh VOC di wilayah Indonesia Timur. Secara umum, Perang Makassar menunjukkan awal dari proses integrasi wilayah Nusantara ke dalam sistem kolonial yang berlandaskan monopoli perdagangan, serta menandai perubahan dalam struktur kekuasaan di daerah tersebut pada abad ke-17.

PENDAHULUAN

Perang Makassar (1666–1669), sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia pada abad ke-17, adalah konflik antara kekuatan maritim pribumi dan ambisi kolonial Eropa. Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), sebuah perusahaan dagang Belanda yang bercita-cita mengendalikan jalur perdagangan dan komoditas vital, terutama rempah-rempah, berhadapan

dengan Kerajaan Gowa, salah satu pusat politik dan perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Sebagai peristiwa multidimensional yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan hubungan kekuasaan dalam kerangka perdagangan dunia modern awal, perang ini lebih dari sekadar konflik militer (Sinaga et al., 2024).

Pada pertengahan abad ke-17, Makassar menjadi pelabuhan internasional yang terbuka untuk para pedagang dari berbagai wilayah Asia dan Eropa. Kebijakan perdagangan bebas yang digunakan oleh Kerajaan Gowa membuat wilayah ini menjadi titik penting dalam jaringan penyebaran barang dari Maluku, Jawa, Melayu, hingga Filipina. Posisi tersebut memperkuat dominasi laut Gowa di wilayah timur Nusantara. Namun, sistem perdagangan terbuka ini bertentangan langsung dengan kebijakan monopoli VOC yang mencoba mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah melalui perjanjian politik dan tekanan militer (Purnamasari & Abdurahman, 2022).

Ketegangan antara Gowa dan VOC makin memburuk karena upaya negosiasi tidak lagi bisa mengatasi perbedaan tujuan dan kepentingan mereka. VOC menganggap Makassar sebagai ancaman bagi kestabilan monopoli dagangnya, sementara Gowa memandang tindakan campur tangan VOC sebagai bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan politik dan kebebasan ekonomi mereka. Pada tahun 1666, perang meletus dalam konteks tersebut, yang melibatkan berbagai pihak lokal dan daerah, termasuk Arung Palakka dari Bone yang bekerja sama dengan VOC (Ridwansyah et al., 2021). Partisipasi aktor lokal tersebut menunjukkan bahwa Perang Makassar bukan hanya konflik antara penduduk asli dan kolonial, tetapi juga bagian dari perubahan politik dalam negeri Sulawesi Selatan.

Secara historis, Perang Makassar menunjukkan perubahan dalam struktur kekuasaan daerah dari dominasi kuasa laut lokal menjadi bagian dari sistem kolonial VOC. Peristiwa ini memengaruhi secara luas segi politik, ekonomi, dan sosial di Sulawesi Selatan dan juga mempercepat upaya Belanda dalam memperkuat pemerintahan kolonialnya di kawasan Nusantara. Oleh karena itu, mempelajari dinamika politik dan bentuk perlawanan Kerajaan Gowa dalam perang tersebut sangat penting untuk memahami tahap awal proses kolonisasi serta perubahan kekuasaan di wilayah Indonesia Timur. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang mendorong terjadinya Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669, serta mengeksplorasi berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan Kerajaan Gowa terhadap VOC, dari sudut pandang sejarah dan struktur sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang makna strategis Perang Makassar dalam sejarah perjuangan dan pembentukan pola kekuasaan di Nusantara (Hasaruddin, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669, dengan cara mencari dan memahami sumber-sumber sejarah yang terkait (Pujaastawa, n.d.).

Tahapan penelitian terdiri dari empat bagian. Pertama, heuristik, yaitu mencari sumber seperti buku, artikel jurnal, dan karya historiografi yang membahas Kerajaan Gowa, VOC, dan Perjanjian Bongaya. Kedua, kritik sumber untuk mengevaluasi kebenaran, konsistensi, serta kemungkinan adanya bias, terutama pada sumber-sumber yang berasal dari masa kolonial. Ketiga, interpretasi data dengan menerapkan perspektif hegemoni, kolonialisme, dan teori konflik agar dapat memahami dinamika politik dan bentuk perlawanan yang dihadapi Gowa. Keempat, historiografi, yaitu menyusun hasil analisis tersebut menjadi sebuah narasi ilmiah yang terstruktur

dan logis. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai latar belakang, proses, serta dampak Perang Makassar dalam konteks perubahan kekuasaan di wilayah Indonesia Timur pada abad ke-17 (Agus Subagyo, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Politik dan Ekonomi Maritim Gowa sebagai Latar Struktural Konflik

Penelitian menunjukkan bahwa Perang Makassar tahun 1666 hingga 1669 terjadi karena adanya perbedaan mendasar dalam dua sistem ekonomi dan politik yang berdekatan. Kerajaan Gowa-Tallo di abad ke-17 berkembang menjadi kekuatan maritim yang menerapkan sistem perdagangan terbuka. Makassar berperan sebagai pelabuhan antara yang menghubungkan jaringan perdagangan dari Malaka, Jawa, Maluku, Filipina Selatan, serta jaringan pedagang Eropa selain Belanda seperti Portugis dan Inggris. Sistem ini membentuk suasana ekonomi yang cosmopolitan, relatif termasuk dan kompetitif (Khaeruddin, 2022).

Dari sudut pandang ekonomi dan politik, sistem perdagangan Gowa menunjukkan cara kerja jaringan perdagangan yang tidak mengandalkan satu pihak saja. Kebijakan itu memperkuat kekuatan politik kerajaan karena kemakmuran ekonomi menjadi dasar kestabilan kekuasaan. Sebaliknya, VOC menerapkan model bisnis korporasi-kolonial yang memonopoli dan mengontrol wilayah-wilayah yang menjadi jalur distribusi rempah-rempah. Oleh karena itu, konflik antara Gowa dan VOC bukan hanya pertarungan militer, tetapi juga pertarungan tentang kekuatan ekonomi dalam konteks sistem kapitalisme awal. Data sebelumnya menunjukkan bahwa VOC memandang Makassar sebagai ancaman penting karena menjadi pusat pengiriman rempah-rempah yang membuat monopoli VOC di Maluku menjadi kurang efektif. Selama Makassar tetap menjadi pelabuhan bebas, kebijakan ekstirpasi dan pengendalian harga yang dijalankan VOC sulit berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, menghancurkan kekuatan Gowa menjadi syarat penting bagi VOC dalam memperkuat dominasinya di wilayah timur Nusantara (Anzar Abdullah, 2017).

Di sisi lain, VOC menerapkan prinsip monopoli dalam perdagangan, terutama terhadap komoditas rempah-rempah di wilayah Maluku. Politik monopoli ini bertentangan langsung dengan sistem perdagangan bebas yang diterapkan oleh Gowa. Ketegangan ekonomi akhirnya berubah menjadi konflik politik karena Gowa dianggap sebagai penghalang utama dari upaya VOC untuk mendominasi wilayah bagian timur Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber konflik bersifat struktural, yaitu terkait dengan persaingan dalam mengendalikan jalur perdagangan, kekuatan hukum laut, dan pengaruh politik di wilayah tersebut.

2. Fragmentasi Politik Lokal dan Strategi Aliansi VOC

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan VOC tidak terlepas dari kemampuannya dalam memahami dan memanfaatkan kondisi politik lokal. Hubungan antara Gowa dan Bone sebelumnya sering diwarnai oleh persaingan dan ketegangan dalam urusan politik. Kebangsaan Gowa yang mendominasi kerajaan-kerajaan Bugis, termasuk Bone, menciptakan sisa-sisa perang yang kemudian dimanfaatkan VOC sebagai cara untuk membangun kesepakatan bersama. Arung Palakka menjadi tokoh utama dalam proses tersebut. Dukungan VOC terhadap Arung Palakka bukan hanya bentuk bantuan politik, tetapi juga bagian dari rencana strategis untuk memecah dan menguasai secara sistematis. Dengan menggabungkan kekuatan lokal ke dalam operasi militer, VOC tidak hanya mendapatkan keuntungan dalam hal taktik, tetapi juga mendapatkan pengakuan sosial dari kerajaan-kerajaan yang merasa tertekan karena dominasi Gowa (MUH. AKBAR ADAM, 2025).

Dari sudut pandang teori politik kolonial, kondisi ini menunjukkan bahwa kolonialisme beroperasi dengan cara mengelola konflik yang terjadi di dalam wilayah lokal itu sendiri. VOC bertindak sebagai penggerak yang mengubah persaingan regional menjadi konflik yang lebih luas, akhirnya menyebabkan perubahan dalam distribusi kekuasaan. Dengan demikian, Perang Makassar perlu dipahami sebagai konflik yang melibatkan tiga pihak, yaitu Gowa, Bone, dan VOC, di mana kepentingan masing-masing saling terkait dalam struktur kekuasaan yang terus berubah (Krisaldi Gusti Pratama & Joni Widjayanto, 2023).

Aliansi VOC–Bone menunjukkan strategi *divide et impera* yang berhasil dalam mengurangi kekuatan Gowa. Dengan memanfaatkan perbedaan antar kerajaan lokal, VOC berhasil menggabungkan kekuatan militer Eropa dengan bantuan pasukan lokal yang mengenal kondisi medan dan struktur masyarakat setempat. Sehingga, Perang Makassar bukan hanya sebuah perang kolonial, tetapi juga pertarungan antar kekuatan lokal yang dipengaruhi oleh kepentingan dari luar. Fragmentasi politik di dalam negeri menjadi faktor penting dalam menentukan akhir dari perang tersebut (Syahrir Kila, 2020).

3. Strategi Militer, Teknologi, dan Ketimpangan Kekuatan

Dalam bidang militer, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan struktur yang tidak seimbang antara Gowa dan VOC. Kerajaan Gowa memiliki angkatan laut yang tangguh dan sistem pertahanan yang memanfaatkan benteng, terutama Benteng Somba Opu yang menjadi tanda kuatnya pertahanan laut Makassar. Namun, VOC memiliki keunggulan dalam teknologi senjata api, organisasi militer modern, serta pengalaman perang di berbagai wilayah yang didapat dari operasinya di seluruh dunia (Ridwansyah et al., 2021).

Perang yang berlangsung sejak tahun 1666 menunjukkan pola pengepungan yang dilakukan secara sistematis oleh VOC. Penggunaan senjata meriam jarak jauh dan strategi penghalang laut secara perlahan membuat pasokan logistik Gowa semakin berkurang. Ketahanan Gowa saat dipimpin Sultan Hasanuddin menunjukkan cara berusaha memperkuat diri dari dalam dan menggunakan simbol-simbol untuk menggerakkan masyarakat. Sultan Hasanuddin bukan hanya menjadi pemimpin militer, tetapi juga seorang tokoh yang diakui secara resmi, yang menyampaikan perlawanan sebagai bentuk perlindungan terhadap kekuasaan dan kemuliaan kerajaan. Namun, tekanan dari berbagai pihak, seperti militer dan politik, membuat situasi Gowa semakin sulit. Perjanjian Bongaya tahun 1667 kemudian diperkuat lagi setelah jatuhnya Somba Opu pada tahun 1669, yang menunjukkan bahwa keunggulan militer VOC berjalan bersamaan dengan tekanan dalam diplomasi (Syahrir Kila, 2020). Perjanjian itu tidak hanya sekadar kesepakatan untuk damai, tetapi juga alat untuk mengatur hierarki kekuasaan politik.

Strategi utama VOC dalam Perang Makassar adalah menggabungkan cara menghalangi pergerakan di laut dengan menyerang secara perlahan pusat pertahanan Gowa. Blokade laut berdampak besar karena memutus jalan pengiriman barang dan jalur dagang yang menjadi sumber kekuatan ekonomi kerajaan. Dalam konteks ini, perang ekonomi berlangsung secara bersamaan dengan perang militer. VOC juga menggunakan strategi perang berlapis, yaitu dengan menggabungkan serangan langsung dan tekanan diplomatik melalui perjanjian. Perjanjian Bongaya tahun 1667 menunjukkan bagaimana VOC menggunakan perjanjian hukum sebagai cara untuk mengurangi kekuatan Gowa sebelum menyerang secara langsung pada tahun 1669. Sehingga kemenangan VOC bukan hanya karena senjata yang lebih baik, tapi juga karena gabungan antara kekuatan tentara, cara berbicara dengan negara lain, dan mengelola masalah di dalam negeri (PUTRI et al., 2025).

4. Perjanjian Bongaya sebagai Instrumen Hegemoni Kolonial

Analisis terhadap isi Perjanjian Bongaya menunjukkan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang secara sistematis membatasi kedaulatan Kerajaan Gowa. Di antaranya adalah pengakuan terhadap monopoli VOC, pembatasan hubungan dagang dengan bangsa Eropa lain, penurunan benteng pertahanan, serta pengakuan terhadap kedudukan Bone yang didukung VOC. Dari sudut pandang hukum kolonial, perjanjian ini menunjukkan cara penguasaan kekuasaan dilakukan melalui kontrak. VOC menggunakan cara hukum untuk mendukung dan sahkan kekuasaannya dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, kolonialisasi tidak hanya terjadi lewat kekerasan militer, tetapi juga melalui penerapan hukum yang resmi, yang memaksa kerajaan lokal untuk berada dalam struktur yang bersifat tunduk (Fian Anawagis, 2023).

Perjanjian Bongaya juga menunjukkan cara hukum kolonial digunakan sebagai alat untuk memperkuat dominasi dan kekuasaan. Menurut teori hegemoni (Gramsci), dominasi tidak hanya terjadi karena kekuatan yang paksa, tetapi juga karena persetujuan yang dibuat secara struktural. Meskipun ditandatangani dalam situasi yang tertekan, perjanjian tersebut tetap memberikan kesan bahwa VOC memiliki wewenang hukum dan pengakuan resmi atas kekuasaannya. Dengan adanya dokumen resmi, VOC bisa menyatakan bahwa kehadirannya di Makassar bukan hanya karena penaklukan, tetapi karena ada kesepakatan resmi dengan pemerintah setempat. Legalitas ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas dalam jangka waktu yang lama dan mengurangi kemungkinan adanya penolakan terbuka dari kerajaan-kerajaan lain (Bahri, 2016).

Meskipun perjanjian itu menunjukkan kekalahan politik Gowa, dalam ingatan bersama masyarakat Sulawesi Selatan peristiwa tersebut justru memperkuat simbol perlawanan Sultan Hasanuddin. Perjanjian Bongaya sering dianggap sebagai contoh tekanan kolonial yang tidak seimbang, sehingga memperkuat cerita tentang semangat heroik dan ketangguhan dalam menghadapi pengaruh asing. Dalam sejarah nasional Indonesia, Perjanjian Bongaya dianggap sebagai salah satu contoh awal dari kebijakan kolonial yang merugikan para raja-raja di Nusantara. Narasi ini membantu membangun identitas nasional dengan menganggap perlawanan lokal sebagai bagian dari perjuangan besar melawan kolonialisme (Khaeruddin, 2022).

5. Dimensi Sosial-Kultural dan Makna Perlawanan

Perang Makassar tahun 1666 hingga 1669 bukan hanya pertarungan militer dan politik antara Kerajaan Gowa dengan VOC, tetapi juga peristiwa sosial dan budaya yang membentuk identitas, nilai-nilai bersama, serta kenangan sejarah masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam konteks ini, perlawanan terhadap VOC tidak bisa disamakan hanya dengan pertikaian kekuatan, melainkan harus dilihat sebagai bentuk ungkapan nilai-nilai sosial, etika kehormatan, dan kebenaran budaya yang terdapat dalam struktur masyarakat Bugis-Makassar pada abad ke-17. Dimensi sosial dan budaya tersebut menunjukkan bahwa perang menjadi tempat pembuatan makna yang melebihi kepentingan ekonomi dan politik dalam jangka waktu yang singkat (Darmawijaya, 2017).

Salah satu konsep penting dalam memahami aspek sosial dan budaya Perang Makassar adalah nilai siri, yang dalam adat Bugis-Makassar berkaitan dengan rasa harga diri, kehormatan, dan martabat bersama. Siri bukan hanya tentang nilai pribadi, tetapi juga prinsip moral yang menghubungkan anggota komunitas dalam struktur sosial yang memiliki hierarki. Kehilangan siri dianggap sebagai kehilangan kepercayaan sosial dan eksistensi. Dalam perang, ancaman VOC terhadap kedaulatan Gowa tidak hanya dianggap sebagai usaha mengganggu perekonomian, tetapi juga sebagai serangan terhadap martabat kerajaan dan masyarakatnya. Penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli VOC bisa diartikan sebagai cara untuk menjaga kesatuan

kekuatan kerajaan secara bersama-sama. Dengan demikian, perlawanan tersebut memiliki makna moral yang kuat, karena mempertahankan kedaulatan sama artinya dengan menjaga martabat. Nilai siri juga menjelaskan mengapa perlawanan terjadi dengan sangat sengit meskipun secara militer terdapat perbedaan kekuatan yang cukup besar. Dalam aturan kehormatan lokal, menyerah tanpa melawan bisa dianggap sebagai tanda merendahkan martabat. Oleh karena itu, perang menjadi cara untuk menegaskan identitas sosial sekaligus bentuk pertunjukan persatuan bersama (Sinaga et al., 2024).

Perang Makassar memiliki dampak sosial dan budaya yang tidak hanya terjadi pada masa abad ke-17, tetapi terus diperdebatkan dan diperbarui dalam catatan sejarah serta ingatan bersama masyarakat. Sultan Hasanuddin kemudian dijadikan sebagai simbol pahlawan nasional, dan Perang Makassar dipahami sebagai bagian dari rangkaian perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Transformasi makna ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya sekadar catatan fakta, tetapi juga proses pembentukan cerita yang terus berkembang. Dalam sejarah kolonial, perang biasanya digambarkan sebagai usaha untuk mengatur kekuatan lokal yang dianggap mengacaukan jalannya perdagangan. Dalam sejarah nasional Indonesia, perang digambarkan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa. Perbedaan dalam cerita ini menunjukkan bahwa makna perlawanan tergantung pada konteks dan faktor politik. Setiap masa sejarah memandang kembali Perang Makassar sesuai dengan kebutuhan ideologis masing-masing masa. Setelah Indonesia merdeka, sosok Sultan Hasanuddin dianggap sebagai simbol persatuan bangsa dan bentuk perlawanan terhadap sistem pemerintahan luar (Hasaruddin, 2021).

KESIMPULAN

Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 adalah peristiwa sejarah yang menunjukkan adanya pertikaian kompleks antara kekuatan laut lokal dan penjajahan ekspansi kapitalisme oleh VOC di wilayah timur Nusantara. Konflik ini tidak bisa dipahami hanya sebagai perang militer biasa, tetapi lebih dari itu, ia mencerminkan pertarungan yang rumit antara kekuasaan ekonomi, perubahan politik di wilayah tersebut, pengembangan strategi militer, serta penciptaan makna dalam aspek sosial dan budaya. Dari segi ekonomi dan politik, perang ini muncul karena perbedaan cara berdagang antara sistem pelabuhan terbuka yang dijalankan oleh Kerajaan Gowa dan kebijakan monopoli yang diterapkan VOC. Selama Makassar bertindak sebagai pusat perdagangan bebas, kekuasaan VOC atas jalur distribusi rempah-rempah di Maluku tetap tidak bisa sepenuhnya dipegang erat. Oleh karena itu, penaklukan Gowa menjadi langkah penting dalam upaya mengintegrasikan daerah timur Nusantara ke dalam sistem kapitalisme kolonial pada abad ke-17.

Dalam bidang politik, keberhasilan VOC tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan pecahan internal yang terjadi di Sulawesi Selatan. Aliansi dengan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka menunjukkan bahwa kolonialisme bekerja dengan cara memediasi konflik daerah dan membangun kembali struktur kekuasaan di tingkat regional. Sebab itu, Perang Makassar bukan hanya pertikaian antara pihak "kolonial" dan "pribumi," tetapi juga tempat adu kekuatan antar kelompok lokal yang saling berkaitan dengan tujuan besar VOC secara internasional. Dari segi militer, perang ini menunjukkan perbedaan yang besar antara sistem pertahanan tradisional kerajaan laut dan organisasi militer modern yang didasarkan pada perusahaan. Keunggulan teknologi senjata, strategi penghalangan, serta kerja sama antara kekuatan militer dan diplomasi membantu VOC mengubah kemenangan kecil menjadi kekuasaan yang berkelanjutan. Perjanjian Bongaya menjadi dokumen resmi yang memperkuat pemindahan

kekuasaan dari Kerajaan Gowa dan menandai mulainya ketergantungan politik serta ekonomi kerajaan tersebut dalam sistem kolonial.

Secara umum, Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 menjadi momen penting yang mengubah arah sejarah wilayah Indonesia timur. Peristiwa ini berakhirnya dominasi laut Gowa sebagai pusat perdagangan yang ramai dan juga mempercepat penggabungan Sulawesi Selatan ke dalam sistem perdagangan kolonial dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolonialisme VOC berjalan dengan menggabungkan kekuatan militer, strategi kerja sama politik, serta dasar hukum yang sah, sedangkan perlawanan dari masyarakat lokal muncul sebagai upaya untuk menjaga kekuasaan, identitas, dan nilai-nilai kolektif mereka. Oleh karena itu, Perang Makassar perlu dipahami sebagai momen penting dalam hubungan antara kekuatan lokal dan pemekaran kolonial di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-17. Analisis dalam berbagai aspek mengenai perang ini tidak hanya memperkaya studi sejarah Indonesia, tetapi juga memberikan pemahaman teoretis tentang cara kerja penguasaan kolonial dan perubahan bentuk perlawanan dalam konteks dunia modern awal.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Subagyo. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Anzar Abdullah. (2017). *KERAJAAN BONE DALAM LINTASAN SEJARAH SULAWESI SELATAN (SEBUAH PERGOLAKAN POLITIK DAN KEKUASAAN DALAM Mencari, Menemukan, Menegakkan dan Mempertahankan Nilai-nilai Entitas Budaya Bugis)*. 12(2), 15–28.
- Bahri. (2016). *Perebutan Panggadereng di Kerajaan Lokal di Jazirah Sulawesi Selatan Abad XV-XVII*. 12(1).
- Darmawijaya. (2017). *PENJELASAN SEJARAH ATAS KELUARNYA ARUNG PALAKKA DARI BARISAN SULTAN HASANUDDIN MENJELANG PERANG MAKASSAR*. 8.
- Fian Anawagis, S. S. (2023). *Arus Balik Kekuasaan di Sulawesi Selatan Abad ke-17*. 06(December), 99–109.
- Hasaruddin. (2021). *PEMBAHARUAN PERJANJIAN BONGAYA : Dampak Pada Kesultanan Buton*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2, 31–32.
- Khaeruddin. (2022). *Dinamika Politik Kerajaan – Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan : Dari Persekutuan Diplomasi Hingga Konfrontasi Perebutan Superioritas (Abad XV-XVII)*. 6(2), 111–124.
- Krisaldi Gusti Pratama, & Joni Widjayanto. (2023). *REFLEKSI SRATEGI PERJUANGAN ARUNG PALAKKA DALAM KONTEKS PERANG SEMESTA*. 10(2).
- MUH. AKBAR ADAM. (2025). *RELEVANSI PERJANJIAN BONGAYA 1667 DAN 1824 DALAM PERUBAHAN SOSIAL POLITIK ANTARA KERAJAAN GOWA DAN BELANDA (VOC)*.
- Pujaastawa, I. B. G. (n.d.). *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*.
- Purnamasari, N. A., & Abdurahman. (2022). *Identitas Kerajaan Gowa Berdasarkan Koleksi Museum Balla Lompoa Sungguminasa di Kabupaten Gowa , Sulawesi Selatan Identity of the Gowa Kingdom Based on the Collection of Museum Balla Lompoa Sungguminasa in Gowa Regency , South Sulawesi*. 7, 4–11. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.3182>
- PUTRI, H., BURHANUDDIN, & SITI MARYAM PANE. (2025). *Analisis Historis Tentang Perjuangan Sultan Hasanuddin Melawan VOC Di Sulawesi Selatan Tahun 1660-1669*. 5(2), 235–242.

-
- Ridwansyah, M., Mukhsin, & Aryandi Sudika. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Sejarah Kebudayaan Islam di Kerajaan Gowa*. 2(2), 203–208.
- Sinaga, R., Vito, J., Ocha, S., Tondang, P., & Larasati, S. (2024). *Masa Pemerintahan VOC di Nusantara : Awal Kedatangan Hingga Penyebab Bubarnya VOC*. 1(2), 389–397.
- Syahrir Kila. (2020). *HUBUNGAN KERAJAAN MAKASSAR DENGAN KERAJAAN BUTON ABAD KE-17*.